

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ais, Chattamarrasjid, 2004, *Penerobosan Cadar Perseroan Dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Ali, Zainuddin, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmun Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Yahya, Harahap, M., 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sembiring, Sentosa, 2012, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuansa Aulia
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Suteki, Taufani Galang.2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik*, Jakarta:Raja Grafindo.
- Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Jakarta: Rajagrafindo
- Rai , I.G., Wijaya, 2000. *Hukum Perusahaan*, Bekasi: Kesaint Blanc.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas LN No. 39 Tahun 1998, TLN No. 3740.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 4 Oktober 2000 nomor M-01.HT.01.01 tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 12 Juli 2002 nomor M-05.HT.01.01 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 September 2007 nomor M.01-HT.01-10 tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 September 2007 nomor M.02.HT.01.10 tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 7 Januari 2008 nomor M-01.HT.01.01 tahun 2008 tentang Daftar Perseroan.

Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Januari 2003 nomor C-01.HT.01.01 tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH 02.AH.01.01 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan.

Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Januari 2003 nomor C-01.HT.01.04 tahun 2003 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 Maret 2003 nomor C-03.HT.01.04 tahun 2003 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tentang Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor C-UM.06.10.05 tanggal 28 Maret 2001 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan SISMINBAKUM nomor C-

UM.06.08 tanggal 28 Maret 2001.

C. Jurnal, Makalah, Skripsi

Diharti Anny, 2008, Tesis : *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Melalui SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum)”* Semarang: Universitas Diponegoro.

D. Internet

[https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks Kemudahan Berbisnis](https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Kemudahan_Berbisnis) Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2019 Pukul 21.09 WIB

<http://eodb.ekon.go.id/indikator-eodb/> Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2019 Pukul 21.31 WIB

<http://eodb.ekon.go.id/capaian-reformasi/#> Diakses Pada Tanggal 9 September 2019 Pukul 21.35 WIB

<https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/ease-of-doing-business-di-indonesia-terus-membaik> Diakses Tanggal 9 September 2019 Pukul 20.22 WIB

http://se2016.bps.go.id/lanjutan/files/booklet/booklet_0000.pdf Diakses Pada Tanggal 22 September 2019 Pada Pukul 19.47 WIB